

Bali Kehilangan Rp 200 Miliar

Akibat Penutupan Bandara Ngurah Rai

MANGUPURA - Penutupan Bandara Ngurah Rai akibat erupsi Gunung Barujari, anak Gunung Rinjani di NTB menimbulkan dampak cukup dahsyat. Perekonomian sektor pariwisata paling terpukul akibat penutupan bandara. Penutupan yang terjadi sejak Selasa (3/11) hingga Kamis sore kemarin (5/11), kerugian diperkirakan mencapai Rp 200 miliar lebih. Data tersebut didapat dari batalnya kunjungan turis ke Pulau Bali. Kerugian Rp 200 miliar tersebut belum termasuk potensi kehilangan penghasilan dari sektor lain.

Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asota) Bali Ketut Ardana menjelaskan, biro perjalanan wisata di Bali sangat merasakan dampak penutupan bandara. Pasalnya, turis yang telah mengagendakan liburan ke Bali langsung membatalkan kunjungan ke Bali. Kerugian Rp 200 miliar lebih ini didasarkan pada perhitungan turis ke Bali sebanyak 4.000 sampai 5.000 orang tiap hari.

Kerugian tersebut juga dihitung dari harga paket wisata yang dijual rata-rata USD 550. Selain membeli paket perjalanan, wisatawan yang berlibur ke Bali juga mengeluarkan biaya, seperti membeli oleh-oleh

► Baca Bali... Hal 31

Pariwisata Bali Saat Bandara Tutup

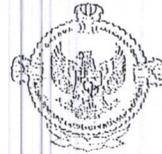
- Penutupan yang terjadi sejak Selasa (3/11) hingga Kamis sore (5/11), kerugian diperkirakan mencapai Rp 200 miliar lebih akibat batalnya kunjungan turis ke Pulau Bali.
- Perhitungan didapat dari rata-rata turis ke Bali sebanyak 4-5 ribu orang per hari.
- Kerugian tersebut juga dihitung dari harga paket wisata yang dijual rata-rata USD 550. Selain membeli paket perjalanan, wisatawan yang berlibur ke Bali juga mengeluarkan biaya, seperti membeli oleh-oleh. Sehingga pengeluaran menjadi rata-rata USD 800, dikalikan jumlah wisatawan yang datang.
- Kerugian Rp 200 miliar tersebut belum termasuk potensi kehilangan penghasilan dari sektor lain.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Jum'at, 6 November 2015

Hal. : 21

Radar Bali



■ BALI...

Sambungan dari hal 21

"Sehingga pengeluaran menjadi rata-rata USD 800, dikalikan jumlah wisatawan yang datang. Itu yang menjadi potensi penghasilan yang hilang. Jadi, kira-kira ada kerugian Rp 200 miliar lebih," jelas Ardana kemarin (5/11).

Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan bahwa penutupan Bandara Ngurah Rai ini menyebabkan Bali mengalami kerugian hingga USD 1,5 juta lebih per harinya. Sebab Bali terpaksa kehilangan rata-rata jumlah wisatawan sekitar 4-5 ribu wisatawan per hari karena penutupan bandara sebagai akses utama ke Bali ini.

"Jadi, saya lihat pembatalan keberangkatan ke Bali masih diimbangi dengan pembatalan keberangkatan keluar Bali. Kerugian Bali per harinya akibat hal tersebut setelah saya cek sebesar USD 1,5 juta lebih per hari. Kerugian itu karena tidak ada yang masuk ke Bali," ungkap pria yang biasa disebut Cok Ace tersebut.

Cok Ace menjelaskan, meski banyak wisatawan yang tertahan di Bali akibat peristiwa tersebut, namun hal tersebut tidak menguntungkan Bali. Khususnya untuk bisnis industri penginapan. Sebab menurutnya, wisatawan yang berlibur di Bali tentunya sudah menyesuaikan lama tinggal dengan kondisi ekonominya. "Sehingga saya harapkan kepada anggota dapat memberikan diskon. Wisatawan tersebut *kan* tidak berharap untuk selama ini tinggal di Bali. Bisa saja uangnya sudah betul-betul habis, karena dia sebelumnya sudah perhitungkan dengan lama tinggalnya di Bali," jelasnya.

Dikatakan Cok Ace, dampak dari penutupan bandara akibat erupsi Gunung Barujari tidak serta merta pulih ketika bandara dibuka kembali. Menurutnya, meski dibuka dalam waktu cepat, potensi wisatawan membatalkan kunjungannya ke Bali karena erupsi dan penutupan bandara cukup besar. "Karena dia (wisatawan, Red) sudah merencanakan ke Bali, namun melihat yang terjadi, bisa saja

mereka melakukan pengalihan tujuan wisata," katanya.

Pantauan *Jawa Pos Radar Bali*, bandara akhirnya melakukan sistem buka tutup. Pada pukul 14.30, dikeluarkan Notam A2479/15Q) WAAF/QFAAK/IV/NBO, Bandara Ngurah Rai mulai dibuka. Dari pantauan citra satelit Himawari pukul 14.00, debu Barujari sudah mulai menjauh dari Bali. Tampak dari pantauan satelit debu juga menjauh dari kawasan Jawa Timur. Pergerakan debu menuju arah barat daya. "Setara aturan buka bandara tidak dibatasi waktu. Penutupan dilakukan apabila kondisi tidak aman," jelas Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Ngurah Rai Rasmus Kayadu.

Sementara itu, IG Ngurah Ardita, Co. General Manager (GM) PT Angkasa Pura I (PAP I) Bandara Ngurah Rai, menjelaskan bandara resmi buka pukul 15.00. Setelah dibuka proses *check in* dilakukan. Penerbangan pesawat pertama dilakukan pukul 17.00. Pantauan Koran ini, pesawat non komersial milik TNI ukuran kecil tampak terbang membuka penerbangan. Sedangkan penerbangan resmi pertama adalah pesawat Air India yang ditumpanginya Wakil Presiden India Muhammad Hamid Ansari. Khusus Wapres India masuk ke pesawat melalui terminal internasional VIP. Pesawat Wapres India terbang tepat pukul 17.25

Setelah pesawat itu, ada tiga pesawat komersial lain dijadwalkan berangkat. Yakni Singapore Airlines, Silk Air, serta AirAsia. "Kabarnya karena saat ini (kemarin sore, Red) debu menjauh dari Bali. Penerbangan kembali kami buka," jelas Ardita. Tapi, lanjut Ardita, sistem buka tutup akan kembali dilakukan. Hal itu tergantung arah dan kondisi angin yang membawa debu vulkanik Barujari.

"Setiap jam kami pantau. Jadi, infonya *update* terus tergantung arah angin," tukas pria berkacamata itu. "Penutupan kami cabut seluruhnya kalau letusan gunung tidak ada lagi. Karena sekarang masih dalam status aktif masih buka tutup," papar Ardita.

Ditanya kerugian di bandara, Ardita mengaku belum mengkalkulasi. Pihaknya masih fokus memberikan pelayanan dan

mengatur kondisi di bandara. Dia memastikan secara bisnis kerugian pasti ada. Namun, pihak bandara berusaha memberikan pelayanan maksimal. Salah satunya dengan menggratiskan, ongkos atau biaya parkir pesawat. "Pesawat yang tertunda keberangkatannya akibat erupsi Barujari kami bebaskan biaya parkir. Tapi, yang baru datang tidak," tegasnya.

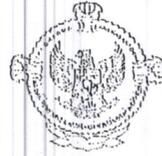
Selain menggratiskan biaya parkir pesawat, pihaknya juga berkoordinasi dengan kantor imigrasi. Tamu asing yang memperpanjang tinggal akibat bencana Barujari mendapat prioritas.

Perpanjangan jadwal penutupan bandara ini, kata Arditha berdampak pada pembatalan ratusan penerbangan dari dan akan ke Bali. Kemarin ada 367 penerbangan yang *cancel*, yakni kedatangan domestik 113 *flight*, keberangkatan domestik 109 *flight*, dan kedatangan internasional 84 *flight*, keberangkatan internasional 61 *flight*. "Kalau dari hari Selasa hingga tadi pagi sudah ada 692 *flight* yang dibatalkan," paparnya.

Sementara itu, Kabid Data dan Informasi BMKG Wilayah III Denpasar Nyoman Gede Wirajaya mengungkapkan, sebaran debu yang mengarah ke Bali tidak separah Rabu (4/11). Berdasarkan pengamatan BMKG, debu vulkanik cenderung mengarah ke selatan. "Hari ini (kemarin, Red) anginnya ke selatan Bali," jelas Wirajaya.

Wirajaya menjelaskan sejak abu vulkanik mengarah ke Pulau Bali, beberapa wilayah yang paling parah terdampak adalah Karangasem, Klungkung, dan Gianyar. Walaupun begitu, wilayah Denpasar, Badung, Tabanan, juga mulai terkena dampak. "Tapi, perkembangannya masih kita pantau terus," tandas Wirajaya.

Pihaknya mengaku sudah mengimbau kepada BPBD Provinsi Bali, untuk memberikan atensi terkait hal itu. Ditanya jika turun hujan bisa membuat abu vulkanik hilang, pria asal Gulingan, Mengwi, ini menerangkan tidak bisa serta merta menghilangkan abu vulkanik. Hanya saja bisa mengurangi intensitas jumlah persebarannya di udara. (san/ayu/yes)



Golkan Renovasi Pasar, Monumen hingga Dana Desa

Reses Nyoman Sugawa Korry di Buleleng

DENPASAR -Harapan masyarakat Buleleng untuk segera merenovasi pasar Seririt, Buleleng, menuai titik terang. Pasalnya, dari rencana renovasi terhadap pasar yang sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat kebakaran beberapa waktu silam itu, Pemerintah Provinsi Bali melalui bantuan keuangan khusus (BKK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 akan segera mencairkan dana senilai Rp 14 miliar. Bahkan selain renovasi pasar Seririt, harapan masyarakat di Gumi Panji Sakti Buleleng untuk membangun Monumen Perjuangan Jagaraga di Desa Jagaraga juga bakal terealisasi.



DOK. RADAR BALI

Nyoman Sugawa Korry

Seperti ditegaskan Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry. Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya di DPRD Bali, kemarin (5/11), ia men-

jelaskan bahwa, adanya titik terang realisasi masyarakat Buleleng untuk segera merenovasi pasar dan membuat monumen perjuangan, itu setelah pihaknya melakukan reses (menyerap aspirasi masyarakat) bersama masyarakat, lurah, Bappeda kabupaten dan provinsi, Dinas sosial kabupaten dan provinsi serta tokoh masyarakat LSM di kantor camat Seririt dan Kantor Desa Jagaraga, Buleleng, pada tanggal 28-29 Oktober 2015 lalu.

Dijelaskan, dari hasil reses untuk dua pembangunan itu, pemerintah provinsi Bali melalui BKK akhirnya menyetujui untuk segera mencairkan dana sebesar Rp 29,5 miliar (Rp 14,5 miliar) untuk renovasi pasar, dan Rp 15 miliar untuk pembangunan monumen). "Fealisasi ini bagian dari upaya kami dalam memperjuangkan harapan masyarakat saat reses yang kami lakukan pada Juni 2015 lalu," terangnya.

Lebih lanjut, politisi senior Partai Golkar yang juga ketua DPD II Partai Golkar Buleleng ini menambahkan, selain bagian dari tindakan lanjut dari reses sebelumnya, alasan renovasi Pasar Seririt, itu karena selain pernah mengalami musibah kebakaran dua kali, Pasar Seririt dikatan juga sebagai pusat ekonomi lintas kabupaten dan mampu menggerakkan 6 kecamatan sekaligus seperti kecamatan Seririt, Grogak, Banjar, Busungbiu, Pupuan dan Baturiti." Bahkan selain dana pembangunan monument dan renovasi pasar, masih dalam reses itu, usulan masyarakat terkait realisasi pencairan dana desa pekraman di kabupaten Buleleng juga menuai solusi. Kata Sugawa Korry, selama ini ada kesalahan informasi bahwa sesungguhnya dana bantuan desa pekraman sudah masuk namun lewat rekening di desa dinas. Sebab, menyasati pencairan dana desa pekraman dana dikururkan lewat dana BKK dan ditransfer ke masing-masing desa dinas. (pra/adv)

Edisi : Jumat, 6 November 2015

Hal. : 24



AGUNG BAYU/BALI EXPRESS

KASUS KEDUA: Titib (kiri) dan Praptini saat proses pelimpahan kasus dana punia di Kejati Bali, kemarin.

Kasus Dana Punia Dilimpahkan

DENPASAR - Made Titib (mantan Rektor IHDN) dan Praptini (mantan pembantu rektor II IHDN), yang sudah divonis dalam kasus proyek Rp 25 miliar kembali harus berhadapan dengan kasus hukum. Sebab, kasus korupsi dana punia kini sudah masuk pelimpahan tahap II. Artinya, pelimpahan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum (JPU) yang selanjutnya dilimpahkan ke PN Denpasar dan disidangkan di pengadilan tipikor.

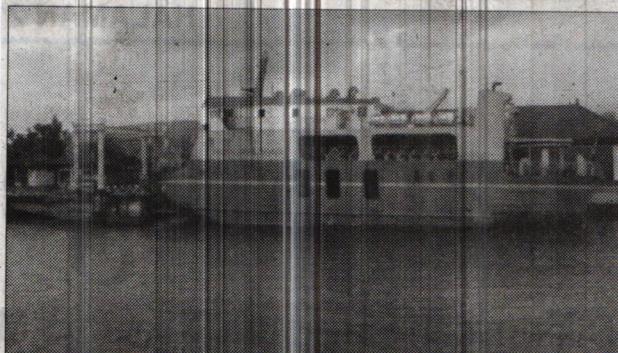
Proses tahap kedua dilakukan di Kejati Bali, dengan JPU Made Arthana, Akmal Kodrat, Wayan Suardi, dan Han Sutopo. Setelah proses di kejati dilanjutkan ke Kejari Denpasar. "Ini proses tahap kedua. Dilimpahkan tersangka dan alat bukti ke JPU. Sebelumnya ditangani oleh jaksa penyidik. Nanti setelah tahap kedua ini, akan dilakukan pematangan dakwaan. Setelah itu, dilimpahkan ke PN untuk sidang ke pengadilan tipikor," jelas Gede Arthana kemarin. (art/yes)

Edisi : Jumat, 6 November 2015

Hal. : 21



JASA PENYEBERANGAN ✓



DOK.RADAR BALI

MASUK DOK: Kapal Nusa Jaya Abadi yang melayani rute penyeberangan dari Pelabuhan Padangbai ke Nusa Penida.

Doking Roro Telan Rp 2 M

SEMARAPURA - Jasa penyeberangan Kapal Nusa Jaya Abadi atau Roro milik Pemkab Klungkung dinyatakan sudah selesai doking di PT PAL Surabaya. Pihak pengelola jasa merencanakan tanggal 7 November kapal sudah sampai di Nusa Penida dan langsung beroperasi. Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Klungkung Nengah Sukasta, menyebutkan biaya doking mencapai Rp 2 miliar. Menurutnya, kali ini menelan biaya besar karena ini termasuk doking besar. Yaitu periode lima tahun sekali.

Sementara untuk tahun depan rencananya untuk biaya doking akan dipasang 1,6 miliar. Menjadi lebih murah karena masuk doking standar. Kedatangan Kapal Roro selama ini memang sudah ditunggu tunggu *krama* Klungkung dan Nusa Penida. Terlebih akan digelar upacara besar tanggal 11 November 2015 pada Bude Cemeng Klau di Pura Penataran Ped. Dikatakan, Kapal Roro berangkat dari Surabaya sore kemarin menuju Nusa Penida Klungkung. Ditanya soal item mana saja yang mendapat perbaikan Sukasta mengaku tidak ingat secara detailnya. Yang jelas katanya doking kali ini termasuk doking besar.

Sementara sebelumnya doking Roro sempat diprotes salah seorang anggota DPRD Klungkung Sang Nyoman Putra Yasa. Anggota Dewan dari Fraksi PDIP ini sempat berkoar kalau doking yang dilakukan terhadap Roro tidak profesional alias amatiran. Bahkan dia juga mengatakan doking dilakukan secara manual. (tra/rid)

Edisi : Jumat, 6 November 2015

Hal. : 22



Pemkab Badung Agendakan Asistensi BPKP dan BPK

MANGUPURA - Sebagai Kabupaten Percontohan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual dalam tahun 2015 ini, telah menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemkab Badung guna terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik, efektif, efisien dan akuntabel. Menyadari bahwa performa dalam pengelolaan keuangan daerah ini akan berimplikasi secara langsung pada upaya terwujudnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sepenuhnya diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat, maka Pemkab Badung memberikan perhatian serius terhadap penerapan SAP berbasis akrual ini.

Acara penyerahan LHP kinerja ini dihadiri oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Wagub Provinsi Bali Ketut Sudikerta, pimpinan DPRD Provinsi Bali, Bupati dan Wali Kota Se-Bali, Ketua DPRD Se-Bali, para inspektur se Provinsi Bali serta SKPD terkait di lingkungan Pemkab Badung. Di antaranya Kadispenda Adi Arnawa, Inspektur Kabupaten Badung Luh Putu Suryaniti, Kabag Keuangan Ketut Gede Suyasa, Kabag Organisasi Wayan Wijana, Kabag Aset Wayan Puja dan Kabag Humas AA Gede Raka Yuda.

Penjabat Bupati Harry Yuda Saka juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersama DPRD Badung akan terus mendorong agar segenap jajaran lingkup SKPD di Badung untuk

berikhtiar menjadikan agenda pemeriksaan dan Audit oleh BPK ini sebagai kebutuhan organisasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa.

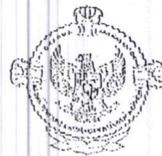
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Dori Santosa SE, MM, di awal pertemuan dengan penjabat Bupati Badung didampingi Sekkab Badung menyampaikan bahwa BPK dalam melaksanakan Audit akan selalu bekerja secara Profe-



Penjabat Bupati Harry Yuda Saka (tengah) saat penyerahan LHP kinerja, kemarin.

sional, dan akan senantiasa membangun sinergi dan komunikasi yang produktif agar semua Kabupaten /Kota di

wilayah Provinsi Bali ini berhasil mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien dan akuntabel. (san/adv)



Tanpa Jalan, Aset Pemkab Terbengkalai

SINGARAJA – Aset milik Pemkab Buleleng yang ada di wilayah Kelurahan Banyuasri, kini terbengkalai. Aset tersebut hanya ditumbuhi tanaman-tanaman palawija, karena tak ada akses jalan yang layak menuju aset tersebut.

Tak mudah menuju lahan milik pemerintah itu. Satu-satunya cara

menuju lokasi itu hanya dengan berjalan kaki, menyeberangi Sungai Banyumala, melalui Jalan Teratai. Dulunya ada akses lain melalui Jalan Ahmad Yani, yang juga harus ditempuh dengan berjalan kaki. Namun kini akses melalui lahan milik warga itu tak bisa dilalui lagi, karena dipagari dengan kawat berduri.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, lahan itu memiliki luas sekitar 1,9 hektare dan sudah dimiliki pemerintah sejak tahun 2002 lalu. Awalnya lahan ini direncanakan sebagai taman kota. Namun sejak era kepemimpinan Bupati Buleleng Putu Bagiada, belum jelas tindak lanjut pemanfaatan lahan tersebut.

Warga yang tinggal di Jalan Teratai,



EKA PRASETYA/RADAR BALI

TAK STRATEGIS: Salah satu warga di Jalan Teratai menunjukkan lahan milik Pemkab Buleleng yang tidak memiliki akses jalan.

Kelurahan Banyuasri juga mengakui jika lahan itu milik pemerintah daerah. Namun warga pun tak tahu pasti dari mana akses jalan menuju lahan itu. "Pak mau cari tanah? Yang disana itu tanah pemda pak, nggak

strategis. Nggak ada jalan. Kalau mau nyebrang sungai, nanti disana ada dah kelihatan papannya," kata salah seorang warga. Kasubbid Pengamanan Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buleleng,

Made Pasda Gunawan, membenarkan lahan itu milik pemerintah daerah. "Memang lahan pemda. Sudah ada sertifikatnya. Papan juga sudah dipasang dulu, waktu masih Bagian Aset," kata Pasda. (eps/gup)

Edisi : Jum'at, 6 November 2015

Hal. : 29